

BAB III

DINAMIKA SERIKAT PEKERJA KERETA API 1908 – 1927

A. Tumbuh dan Berkembangnya Serikat Pekerja Kereta Api Pribumi Pertama: *Vereeniging van Spoor-en Tramwegen Personeel* (VSTP) 1908 – 1925

Serikat pekerja yang berkembang di Jawa pada awalnya berasal dari kalangan pekerja kereta api. Serikat pekerja kereta api memiliki anggota terbanyak daripada serikat-serikat pekerja dari kalangan dinas yang lain. Oleh karena itu, pada perkembangannya nanti, serikat pekerja kereta api ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan kaum pekerja untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Serikat pekerja kereta api terbesar di Jawa pada saat itu adalah *Vereeniging van Spoor-en Tramwegen Personeel* (VSTP). VSTP didirikan oleh pekerja Eropa dari 3 perusahaan kereta api yang berbasis di Semarang pada tanggal 14 November 1908.⁴⁴

Pada awalnya dalam pembentukan VSTP ini, para buruh Eropa bertujuan untuk mengikuti rekan-rekannya yang bekerja di perusahaan Kereta Api Negara yang sebelumnya sudah membentuk perhimpunan *Staatsspoor Bond* (Serikat Pekerja Kereta Api Pemerintah). *Staatsspoor Bond* ini merupakan serikat pekerja orang-orang Eropa yang hanya mengakui buruh Indonesia tingkat atas tanpa memberikan hak suara pada mereka. Dalam VSTP juga terdapat mayoritas pekerja Eropa, namun mereka memberikan hak suara untuk pekerja pribumi yang tergabung dalam serikat tersebut. Sejak berdirinya VSTP, pekerja-pekerja Indonesia mulai menyadari keuntungan yang akan didapat dengan tindakan bersama. Oleh karena itu, mulai tahun 1910 mulai banyak berdiri serikat-serikat pekerja yang terdiri dari orang Indonesia.

Keberhasilan VSTP menjadi sebuah serikat pekerja yang besar pada tahun-tahun berikutnya tidak terlepas dari peran seorang pemimpin seperti Sneevliet. Keterlibatan Sneevliet dalam VSTP kemudian menentukan langkah untuk masa

⁴⁴ Perusahaan kereta api yang berbasis di Semarang itu adalah Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda (NISM), Perusahaan Kereta Uap Semarang – Joana (SJS), dan Perusahaan Kereta Uap Semarang – Cirebon (SCS). Lihat John Ingleson. *Tangan dan Kaki Terikat*. Jakarta : Komunitas Bambu. 2004. hlm. 38

depan VSTP. Sneevliet menyatakan bahwa keberadaan serikat-serikat pekerja haruslah berperan untuk membela kepentingan kaum buruh terhadap kaum kapitalis dan pemerintah yang dikontrol kaum kapitalis. Sneevliet juga menganjurkan agar serikat-serikat yang ada di Hindia Belanda sebaiknya tidak hanya multirasial, tapi juga harus bekerja atas nama mayoritas pekerja pribumi yang dibayar rendah.⁴⁵

Dengan pengaruh dari Sneevliet, pengurus pusat VSTP kemudian memutuskan untuk merekrut anggota-anggota pekerja Indonesia dan memberikan peran dalam jajaran kepemimpinan VSTP. Dalam rapat umum VSTP yang diselenggarakan pada bulan Februari 1914, menghasilkan keputusan untuk memberikan 3 dari 7 posisi pada jajaran Eksekutif Pusat VSTP untuk pekerja pribumi. Keputusan ini merupakan titik balik dimana VSTP menjalani transformasi menjadi sebuah serikat pekerja yang mayoritas beranggota pekerja pribumi.⁴⁶ Selain itu, VSTP yang awalnya merupakan serikat bagi pekerja perusahaan kereta api swasta kemudian menjalankan ekspansinya untuk membuka pintu bagi pekerja perusahaan kereta api negara untuk bergabung dalam VSTP. Langkah-langkah ini membuat VSTP semakin banyak menarik minat pekerja-pekerja pribumi untuk bergabung dengan VSTP. Mayoritas dari anggota VSTP adalah pekerja tingkat rendah yang merasa bahwa VSTP akan dapat melayani kepentingan mereka secara lebih baik dibanding serikat-serikat pekerja kereta api Eropa.

Selain itu, keberhasilan VSTP dalam merekrut anggota juga dikarenakan VSTP terlihat sukses dalam membela kepentingan-kepentingan para pekerja. Organisasi ini membuat survei-survei teratur mengenai penghasilan, konsesi, jam kerja, dan kondisi kehidupan pekerja, serta menghadirkan kasus-kasus terperinci dan tepat untuk pembangunan manajemen pada dua perusahaan swasta besar dan perusahaan kereta api negara. Tekanan yang dilancarkan VSTP dinilai mampu memaksa pihak manajemen kereta api untuk lebih sering meninjau ukuran

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 40

⁴⁶ Keputusan-keputusan untuk menerima dan merekrut para pekerja Indonesia dengan memberikan suara dalam badan Eksekutif tidak diterima oleh hampir seluruh anggota pekerja Eropa. Banyak diantara mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan VSTP. Eksodus pekerja pribumi ke dalam VSTP semakin meningkat saja, sampai-sampai di tahun 1920 jumlah anggota Eropa hanya 236 orang dari jumlah anggota keseluruhan sebanyak 6494. *Ibid.*, hlm. 41

gaji pegawai dan membuat sadar akan kebutuhan-kebutuhan para buruh pribumi, juga menjadikan pihak manajemen lebih waspada terhadap aksi ketidakadilan yang terjadi.

Di tengah-tengah kemajuan yang dicapai oleh VSTP ini kemudian tersiar kabar bahwa Sneevliet mendapat surat panggilan dari residen Semarang sehubungan dengan akan dilakukan pembuangan terhadap diri Sneevliet. Hal mengenai pembuangan Sneevliet ini sudah dibacakan oleh wakil pemerintah dalam sidang Volksraad dan didasarkan pada fatsal 45 regering 3 yang berbunyi:

“Siapa orang, jang tidak asal lahir di Hindia Belanda, jang dianggap berbahaja, boeat ketertiban oemoem, bisalah ditjaboet haknja bertinggal di Hindia Belanda oleh G.G (Gouverneur Generaal) jang mesti moefakatan dengan Raad van Indie....”

Tuntutan ini dilakukan pemerintah sehubungan dengan gerakan politik Sneevliet yang tercermin dalam tulisannya di *Het Vrije Word* pada tanggal 16 November 1918, dimana dia menulis karangan untuk para serdadu yang judulnya ‘Bala Tentara dan Pertoendjoekan Koeasa’.⁴⁷ Setelah terjadi pembuangan terhadap Sneevliet, maka dalam kongres VSTP pada bulan Desember 1918 diputuskan bahwa yang menjadi pimpinan VSTP adalah H.W. Dekker dari NISM dan Sneevliet ditetapkan menjadi wakil VSTP di Belanda.

Kebijakan VSTP yang memutuskan untuk melibatkan pekerja pribumi dalam susunan eksekutif pusat VSTP memunculkan nama-nama pekerja bumiputera seperti Semaoen yang kemudian muncul sebagai propagandist. Semaoen menjadi salah satu pimpinan VSTP sejak tahun 1920, dimana ketika itu VSTP sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada saat itu VSTP memiliki 93 cabang di seluruh Jawa dan beberapa cabang di pesisir barat Sumatera dan Deli dengan jumlah anggota mencapai ribuan orang. VSTP masih terus berjuang untuk menaikkan kesejahteraan dari anggotanya, seperti halnya menuntut perbaikan waktu bekerja; perbaikan belanja bagi pekerja-pekerja NISM,

⁴⁷ *Sinar Hindia*, Selasa 19 November 1918. *Sinar Hindia* merupakan surat kabar yang juga diterbitkan oleh SI, sama halnya dengan *Sinar Djawa*. Namun, isi dari surat kabar ini mencakup wilayah Hindia secara luas, tidak hanya Jawa. Pimpinan redaktur dipegang oleh Semaoen.

SDS, OJS, SJS, dan SCS; membicarakan usul dari cabang-cabang VSTP mengenai belanja pegawai; dan meminta kejelasan tentang penetapan pekerjaan.

Banyak cara ditempuh oleh para pekerja di perusahaan-perusahaan untuk menuntut pimpinan perusahaan memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya dengan melakukan pemogokan seperti yang terjadi dengan para pekerja SCS Cirebon. Ancaman pemogokan telah dilakukan pada 14 Agustus 1920 untuk meminta perbaikan nasib pekerja seiring dengan adanya perbaikan di SS dan protes terhadap *Stationschef* SCS, Van Steenwijk, yang tidak mengabulkan permintaan tunjangan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemogokan pun akhirnya terjadi pada 6 Oktober yang dilakukan oleh pegawai lokomotif SCS karena sikap dari perusahaan yang tidak bergerak cepat dalam memenuhi tuntutan para pekerja. Namun, pemogokan ini dapat mereda pada 10 Oktober 1920 setelah adanya kepastian untuk menetapkan kenaikan penghasilan sesuai dengan SS dalam *Hoofdvertegenwoordiger* yang dilaksanakan antara tanggal 17 – 24 Oktober 1920.⁴⁸ Pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh untuk sedikit memaksa pihak perusahaan agar mau mengabulkan tuntutan mereka tapi bukan berarti setiap pemogokan berakhir dengan keberhasilan. Oleh karena itu, dalam kondisi terdesak peran dari VSTP dibutuhkan untuk mengkoordinasikan semua hal teknis agar pemogokan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan semua yang diinginkan. Semua yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Pusat VSTP pada akhirnya berhasil membuat pimpinan perusahaan memenuhi tuntutan dari para pekerja.

Keberhasilan VSTP dalam memenuhi aspirasi dari pekerjanya ternyata juga diikuti oleh resiko yang harus dihadapi oleh para pimpinannya, seperti yang sudah terjadi dengan Sneevliet. Para pimpinan VSTP tidak terlepas dari tuduhan makar terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dianggap membahayakan ketenteraman dan keselamatan umum. Semaoen pernah dituntut 4 bulan penjara akibat bukunya “*Persdelict Semaoen*” dianggap telah menyebarkan perasaan benci, penghinaan, dan perseteruan pada pemerintah Hindia Belanda (fatsal 154

⁴⁸ Manifest Hoofdbestuur berhubung dengan Pemogokan-Pemogokan di SCS. *Sinar Djawa*, Oktober 1920. Surat kabar Sinar Djawa merupakan organ dari SI yang dikeluarkan oleh NV Handel Maatschappij dan Drukkerij Sarekat Dagang Islam. Redaktur dari Sinar Djawa adalah Semaoen, Marco, Darsono, dan Noto Widjojo.

Straft Wetboek).⁴⁹ Bergsma juga mengalami hal yang sama dengan dianggap sebagai orang yang berbahaya dan terancam untuk dibuang dari Hindia Belanda. Bergsma dipanggil oleh residen untuk dimintai keterangan dan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tentang tuduhan-tuduhan untuk menyangkutkan dia dengan artikel 45 *Regeringsreglement* yang menyatakan bahwa Gubernur Jenderal, dengan persetujuan *Raad van Indie*, dapat menghapuskan hak berdiam di Hindia Belanda kepada orang-orang yang tidak dilahirkan di Hindia Belanda jika ia dipandang berbahaya untuk kepentingan umum.⁵⁰ Perlakuan terhadap para pimpinan VSTP ini bukanlah hal yang aneh mengingat jalan yang mereka tempuh berlandaskan asas revolusioner yang menuntut untuk segera melakukan perubahan. Dengan adanya perlakuan seperti ini juga ikut memperburuk citra VSTP di mata publik, tapi tidak dalam pandangan para pekerja rendahan pribumi yang tergabung didalamnya sebagai anggota.

Permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam perkembangan VSTP diperkeruh dengan terjadinya resesi pada tahun 1922. Pemerintah kolonial pun melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian dan keuangan dalam negeri, seperti melakukan pemotongan besar-besaran di berbagai bidang yang menyangkut pengeluaran pemerintah. Kehidupan dalam rumah tangga perusahaan kereta api juga ikut merasakan akibat dari melemahnya ekonomi dalam negeri. Perusahaan-perusahaan kereta api dapat dikatakan sebagai barometer kesehatan ekonomi di Hindia Belanda. Ketika kondisi ekonomi mengalami peningkatan, seperti beberapa waktu setelah tahun 1918, keuntungan pun didapatkan perusahaan kereta api yang dari jumlah pengangkutan dan muatan penumpang yang cukup besar. Namun saat ekonomi melemah, keuntungan pun ikut turun terlihat dari berkurangnya jumlah angkutan dan muatan penumpang.

Perusahaan-perusahaan kereta api swasta maupun perusahaan kereta api negara kemudian melakukan berbagai langkah ekonomis untuk mengantisipasi menurunnya keuntungan dengan mengurangi berbagai macam pengeluaran. Mulai pertengahan tahun 1922, perusahaan kereta api swasta mengumumkan

⁴⁹ *Si Tetap*, 20 Juli 1919. *Si Tetap* merupakan organ dari VSTP yang berbahasa melayu rendah, sedangkan untuk organ VSTP yang berbahasa belanda adalah *de Volharding*. Redaktur dari *SI Tetap* adalah Semoen.

⁵⁰ *Ibid*, 28 Februari 1922

penghapusan tunjangan biaya hidup setahap demi setahap. NISM bahkan memperkenalkan tawaran tunai pada para pekerja sebagai kompensasi untuk berhenti dari pekerjaannya. Perusahaan juga meningkatkan biaya sewa untuk rumah-rumah milik perusahaan serta menghentikan tunjangan-tunjangan tempat tinggal sebagai pengganti akses pada rumah-rumah milik perusahaan. Di berbagai posisi pekerjaan, perusahaan-perusahaan kereta api negara dan swasta melakukan pengurangan kenaikan gaji dan promosi. Pembayaran kerja lembur pun mengalami perubahan aturan sehingga dinilai memberatkan bagi para pekerja. Usaha-usaha tersebut akan mengalami puncak dengan adanya pemecatan-pemecatan pekerja di berbagai posisi yang dianggap berlebih.

VSTP dalam keadaan seperti ini perlu melakukan berbagai tindakan untuk tetap mengutamakan kepentingan anggotanya. Ketika tidak terjadi resesi saja kondisi para pekerja dapat dikatakan belum layak untuk dikategorikan mendekati kesejahteraan. Saat resesi seperti ini dan kedepannya, kondisi para pekerja mungkin akan lebih memprihatinkan mengingat langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan lebih mementingkan keselamatan modal dan keuntungan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, VSTP dijadikan tumpuan oleh para pekerja untuk tetap memperjuangkan nasib mereka. VSTP bahkan dianggap berbahaya oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan melakukan pemogokan secara besar-besaran yang bertujuan untuk mengubah peraturan negara. Anggapan semacam itu disanggah oleh para pimpinan VSTP, karena VSTP sebagai pergerakan serikat pekerja hanya bergerak secara ekonomi, yaitu mencapai bertambahnya hak dan kesejahteraan untuk penghidupan kaum pekerja. Di dalam pergerakan ekonomi ini, VSTP hanya berusaha untuk memperbaiki penghidupan, gaji, premi, promosi, keuntungan, hak jabatan yang diajukan kepada kaum majikan, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan seperti SS, NISM, SJS, OJS, SCS, dan SDS.

Kondisi yang terjadi pada masa resesi ini sudah tidak menguntungkan lagi bagi para pekerja. Kaum majikan melakukan berbagai penghematan yang berdampak langsung terhadap kaum buruh, seperti menurunkan upah para pekerja, tunjangan dari pemerintah pun dicabut, sampai banyak yang dilepas dari pekerjaannya. Dari banyaknya kebijakan yang merugikan itu, para pekerja spoor

dan tram terpaksa memutuskan untuk melakukan pemogokan pada 8 Mei 1923. Pemogokan yang terjadi kali ini terkesan dipaksakan untuk dilakukan. Para pimpinan VSTP tidak memperhitungkan langkah pemerintah juga kaum modal dalam mengantisipasi jika terjadi pemogokan.

Ekses dari pecahnya pemogokan ini adalah dikeluarkannya artikel 161 bis oleh pemerintah Hindia Belanda. Aturan ini tidak hanya mengancam dengan hukuman denda maksimal f.1000 dan penjara maksimal 5 tahun, tapi juga sudah mengurangi hak mengadakan pertemuan di beberapa karesidenan. Dengan adanya aturan ini menandakan bahwa pemogokan yang dilakukan kali ini mengalami kegagalan. Akibat lain yang muncul setelah pemogokan adalah keluarnya kebijakan baru oleh *Vier Zustermaatschappijen* (SJS, OJS, SCS, dan SDS) yang terkesan sewenang-wenang dengan memperpanjang waktu bekerja dari 8 jam menjadi 14 jam dan gaji maksimal pun diturunkan. NISM melakukan pelepasan jabatan untuk semua pekerja yang melakukan pemogokan, tapi tidak melepas jabatan pekerja yang melanggar aturan hukum jadi setelah bebas dari penjara dapat bekerja kembali. SS telah mengusir dan melepas jabatan pekerja yang mogok. Para pimpinan VSTP pun mendapatkan hukuman yang tidak ringan dari pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan artikel 161 bis. Semaoen mengalami hukuman buangan ke Timor sebelum akhirnya permintaan untuk dipindahkan ke luar negeri dikabulkan dan pada 20 September 1923 tiba di Belanda dan Soedibio diberi hukuman penjara selama 6 bulan.⁵¹

Pergerakan ekonomi VSTP untuk tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan aktifitas. Kondisi ini tidak berarti mencerminkan pergerakan kaum pekerja berhenti begitu saja. Dengan campur tangan kaum komunis dalam PKI, terjadi lagi pemogokan di kantor-kantor percetakan di Semarang pada 21 Juli 1925 bersamaan dengan pemogokan pengangkutan di *Semarangsche Stroom en Prauwenveer* oleh 1000 orang. Belum redanya pergerakan dari kaum pekerja ini kembali dikhawatirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai upaya represif pemerintah melakukan pencabutan hak melakukan pertemuan / rapat umum (*vergadering*) di kota Semarang mulai tanggal 6 Agustus 1925 demi ketertiban

⁵¹ *Si Tetap*, September – Oktober 1923

dan keamanan. Peraturan ini dibuat pada saat kaum pekerja melakukan perlawanan untuk menuntut perbaikan nasib dan mungkin dibuat agar para pemogok jadi tunduk dengan terpaksa oleh keadaan. Sehubungan dengan aturan pemerintah ini, VSTP juga terkena akibatnya dimana kantor VSTP mengalami penjagaan oleh aparat keamanan dan beberapa kali diperiksa oleh *Hoofd Commisaris van Politie* (Kepala Kepolisian). Rencana VSTP untuk melangsungkan kongres pada bulan Agustus pun terpaksa ditunda.

Pada tahun-tahun berikutnya, pergerakan serikat pekerja sangat terbatas ruang geraknya. Banyak aturan-aturan dari pemerintah yang isinya membatasi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bagi kaum pekerja, khususnya yang dipengaruhi oleh komunis. Pada tahun 1926, pemerintah mengeluarkan artikel 153 Bis dan artikel 153 Ter yang akan diberlakukan mulai 1 Mei 1926. Dengan adanya aturan ini menyebabkan beberapa orgaan-orgaan seperti Api, Nyala, dan Mowo terhenti aktifitasnya, juga memberikan pukulan telak bagi PKI dan SR. VSTP dan orgaannya, Si Tetap, pun mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dan tidak bebas lagi untuk mengeluarkan pendapat seperti tahun-tahun sebelumnya.⁵² Aturan-aturan yang mengekang kebebasan pergerakan pun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Di kalangan SS pun dikeluarkan *Circulaire Hoofdinspecteur SS no. 24 / 26* tertanggal 2 Juni 1926, yang menyatakan bahwa setiap pekerja di SS terutama anggota-anggota VSTP dilarang menjadi anggota PKI ataupun SR, dan jika terbukti terlibat dengan organisasi tersebut maka yang bersangkutan akan dilepas dari jabatannya.⁵³

⁵² Artikel 153 Bis, berbunyi : “Barang siapa, jang sengadja melahirken dengan perkataan, toelisan atau gambar, jang bermaksoed baik sindiran, baik tengah-tengah atau bisa didoega-doegea mengganggoe ketenteraman oemoem, baik berkehendak atau setoedjoe dengan angan-angan jang mendjatoehken atau menjerang dari kekoesaan di negeri Belanda atau di Indonesia, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja 6 (enam) tahoen atau denda oeng setinggi-tingginja 300 roepiah.”

Artikel 153 TER, berbunyi: “Barang siapa, jang menjetoedjoei atau menjebarken dengan toelisan atau gambar, jang bermaksoed baik sindiran, tengah-tengah atau dengan perkataan lain-lain, jang bisa menjebabken kegadoehan, ketenteraman oemoem, atau mendjatoehken atau menjerang kekoesaan jang ada di negeri Belanda atau di Indonesia, dengan bermaksoed itoe dioemoemken atau membesarken, menjear, memberitahoeken pada oemoem atau berkata, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja 5 tahoen atau denda oeng setinggi-tingginja 300 roepiah.”

Si Tetap, April – Mei 1926

⁵³ *Si Tetap*, Juni – Juli 1926

VSTP sebagai salah satu organisasi yang pernah menjadi besar dan berpengaruh turut mendapat sorotan dari pemerintah. Pada awal-awal tahun 1926, kantor pusat VSTP diperiksa oleh aparat keamanan pemerintah Hindia Belanda. Dari hasil pemeriksaan itu, sejumlah arsip tahun 1925 dan 1926 dari Pengurus Pusat (Hoofdbestuur) VSTP disita oleh polisi. Di dalam posisi yang sulit tersebut, kondisi VSTP semakin tersudut dengan penangkapan *Voorzitter* (Ketua) mereka pada bulan April dan akhirnya meninggal bulan Mei 1926. Sementara itu, jalannya kepengurusan ditangani oleh pengurus sementara di bawah Sekretaris. Pemeriksaan-pemeriksaan tetap terjadi pada bulan-bulan berikutnya yang menyebabkan VSTP semakin sulit bekerja karena banyaknya barang-barang yang disita oleh polisi.

Perjuangan serikat pekerja untuk mencapai terpenuhinya tuntutan demi kesejahteraan para pekerja semakin terjerembab dalam kemunduran pada tahun-tahun 1926. Upaya pemerintah yang sangat membatasi ruang gerak serikat pekerja pada tahun itu dilatarbelakangi oleh sikap represifnya terhadap organisasi komunis seperti PKI dan SR. PKI dianggap sebagai tokoh utama dibalik terjadinya pemogokan-pemogokan para pekerja dan dianggap membahayakan kepentingan negara pada saat itu. PKI sendiri dalam keadaan yang tedesak tidak tinggal diam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Langkah nyata PKI dalam melawan pemerintah adalah dengan melakukan pemberontakan komunis di beberapa daerah seperti Banten, Batavian dan Priangan pada 12 November 1926. Namun, dalam pelaksanaannya pemberontakan itu tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemberontakan ini mengalami kegagalan dan dengan mudah dapat diantisipasi oleh pemerintah. Kegagalan ini lebih disebabkan oleh adanya perpecahan di dalam tubuh PKI yang membuat koordinasi tidak berjalan dengan lancar. Banyak pimpinan-pimpinan PKI yang ditangkap dan diasingkan, sedangkan calon-calon penggantinya di Jawa terus berbeda pendapat mengenai tujuan PKI yang sebenarnya. Akibat dari pemberontakan ini menyebabkan PKI lumpuh total karena semua pihak yang terlibat ditangkap dan sebagian ditembak atau dibuang ke kamp penjara di Boven Digul.⁵⁴ Setelah adanya pemberontakan

⁵⁴ M. C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981. hlm. 272

PKI ini, hak untuk berorganisasi pun dicabut oleh pemerintah yang menyebabkan serikat pekerja seperti VSTP mengalami ketidakbebasan dalam bergerak dan terpaksa dibubarkan.

B. Lahirnya Perhimpunan *Beambte Spoor* dan Tram (PBST) di Bandung

Perkembangan perhimpunan politik dan serikat pekerja di Hindia Belanda setelah tahun 1926 berada dalam posisi yang “tidak bebas”, dalam artian perkembangannya terus diawasi oleh pemerintah dan dibatasi pergerakannya untuk mencegah menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Keterbatasan yang ada ini merupakan dampak dari adanya upaya campur tangan perhimpunan-perhimpunan politik yang menggunakan serikat pekerja untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan mengadakan pemogokan-pemogokan. Pemogokan ini sebenarnya hanya merupakan bentuk protes terhadap pemerintah atas kehidupan nasib kaum pekerja yang semakin terjepit oleh tuntutan zaman. Para pekerja menuntut perbaikan kesejahteraan hidup dan perbaikan sistem kerja yang tidak layak untuk dijalani mereka. Namun, perjuangan kaum pekerja ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak dari perhimpunan politik seperti Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah VSTP dinyatakan dilarang untuk berkembang di Hindia Belanda dan semakin terjepitnya Sarekat Islam dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, para pekerja rendah dari kalangan pekerja kereta api dan trem masih berupaya untuk mencari suatu bentuk perhimpunan atau serikat pekerja yang dapat menyalurkan aspirasi untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka sebagai pekerja (buruh). Bagaimanapun, nasib kaum pekerja, khususnya pekerja tingkat menengah dan rendah, masih jauh dari kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Baru pada pertengahan tahun 1927, keinginan para pekerja ini untuk mempunyai perhimpunan atau serikat pekerja dapat terkabul dengan berdirinya Perhimpunan *Beambte Spoor* dan Tram (PBST). Perhimpunan ini berada di bawah naungan *Spoorbond*, yaitu

perhimpunan pekerja *spoor* dan *tram* klas I (*ambtenaar*), yang berada di bawah pimpinan F. H. W. Rooijackers.⁵⁵

Pembentukan PBST ini tidak lepas dari dikeluarkannya *Circulaire Hoofdinspecteur* No. 32/26 yang berisi tentang sikap yang diambil oleh perusahaan SS en Tramwegen terhadap VSTP. Dalam *circulaire* ini dijelaskan bahwa VSTP dibatasi hak bersidangnya oleh pemerintah karena perkumpulan ini dianggap sudah mendapat pengaruh dari orang-orang luar yang berhaluan komunis. Selain itu, pemerintah dengan surat edaran tertanggal 17 September 1924 No. 298x (*Bijblad* No. 10683) juga melarang pegawai negeri tinggi maupun rendah membuat propaganda yang membahayakan kedudukan pemerintah baik dengan terus terang ataupun berupa sindiran. Dalam *circulaire* ini juga, dimuat kebijakan bagi pekerja *spoor* dan *tram* untuk membentuk suatu perhimpunan atau serikat pekerja seperti ter kutip berikut ini:

“ . . . Akan tetapi, pegawai2 *spoor* tida' terlarang memboeat soeatoe perkoempoelan, jang benar2 bermaksoed akan memperhatikan keperluan lid2nja dalam pekerdjaan (vakbelangen). Dienstleiding juga tida' keberatan dengan VSTP bila perkoempoelan ini sesungguhnya mempoenjai meroepakan organisasi sedjati . . .”⁵⁶

PBST ini resmi didirikan pada tanggal 10 Juli 1927 di Bandung dalam suatu vergadering yang diadakan di Gedung *Societeit Ons Genoegen* yang dipimpin oleh Mardjo sebagai ketua komite. Menurut Rooijackers, Ketua *Hoofdbestuur* (Pengurus Pusat) *Spoorbond*, sebenarnya rencana pembentukan PBST ini sudah dikemukakan pada tahun 1926, namun masih ada beberapa hal yang mengganjal salah satunya pertimbangan mengenai uang *contributie* yang dianggap terlalu memberatkan. Setelah dilakukan beberapa pertimbangan dan perubahan barulah pembentukan PBST ini dapat dilaksanakan. Dalam rapat peresmian PBST ini telah hadir 80 orang pegawai *Staatsspoorwegen* (SS) termasuk Ketua dan Sekretaris dari Pengurus Pusat *Spoorbond* dan anggota dari *Raad van Advies*, juga ketua *afdeling* Bandung dari *Spoorbond*.

⁵⁵ *Kereta Api*, 15 Agustus 1927

⁵⁶ *Staatsspoor-en Tramwegen Circulaire* Hisp. No. 32 / 26: Sikapnja Dienstleiding kepada VSTP dalam *Kereta Api*, September 1927

Adapun tujuan dari pembentukan PBST ini, seperti yang dikemukakan oleh ketua komite, adalah untuk menjadi suatu perkumpulan yang dapat menyatukan semua pekerja supaya suatu permohonan yang menyangkut kesejahteraan anggota untuk diajukan ke atasan-atasan dapat dimudahkan. Namun, perhimpunan ini terbentuk hanya bertujuan untuk urusan ekonomi dan kesejahteraan anggota saja, dengan tidak dicampuri oleh urusan politik. Dari *Spoorbond* sendiri, Rooijackers mengharapkan dengan adanya PBST dapat menjembatani jika ada keperluan untuk kepentingan anggotanya dapat menghadap kepada pemimpin di SS dengan pengharapan permintaan itu dapat dikabulkan. Rooijackers juga menerangkan bahwa Pemimpin *Spoorbond* dan *Raad van Advies* akan bersedia untuk memberikan pertolongan bila perlu dan meminta agar anggota dari pengurus pusat PBST tidak terdiri dari orang yang tidak termasuk dari lingkungan SS, dengan kata lain harus pekerja pada spoor dan tram saja yang dapat menjabat sebagai pengurus pusat PBST. Hal ini dimaksudkan agar para pemimpin PBST tidak mendapat pengaruh dari pihak lain yang dapat merusak perhimpunan. Dalam rapat ini juga langsung ditentukan pengurus pusat sementara PBST (*Voorlopig Hoofdbestuur*), yaitu:

Voorzitter (Ketua) : Wiriaatmadja, *Onderwijzer Cursus SS Bandung*

Secretaris : Soemodinoto, *Hoofdteekenaar*

Peningmeester (Bendahara) : Wiriosoeharto, *Hoofdteekenaar*

Pengurus pusat PBST ini untuk sementara bertempat jalan Katja-katja Wetan no. 95 Bandung. Alamat ini dapat digunakan bagi siapa saja yang mau mengirim surat atau wesel pos untuk pembayaran uang *contributie*.⁵⁷

Pembentukan PBST ini juga disertai dengan pengenalan surat kabar KERETA API sebagai organ dari PBST. Pemberian nama KERETA API untuk organ dimaksudkan PBST diumpamakan sebagai kereta api agar dapat menarik, mengumpulkan, dan menghubungkan seluruh pekerja *spoor* dan *tram*, untuk membantu dengan setia di dalam PBST dan agar dapat merasakan perbaikan nasibnya serta kemajuan perusahaan.⁵⁸ Surat kabar KERETA API ini diterbitkan satu bulan sekali setiap tanggal 15 setiap bulannya. Surat kabar ini berisi seputar

⁵⁷ *Loc.Cit., Kereta Api, 15 Agustus 1927*

⁵⁸ *Kereta Api, September 1927*

pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di dalam SS mulai dari kebijakan *Hoofdinspectuur*, kabar dari cabang-cabang PBST di berbagai daerah, maupun sumbangan tulisan dari para anggota yang berisi saran, tuntutan, ataupun protes terhadap sikap para petinggi SS. Surat kabar ini diterbitkan sesuai dengan keadaan keuangan sehingga jumlah halaman dalam tiap edisi tidak menentu.

Selain itu, dalam rapat pembentukan PBST ini juga dikeluarkan *statuten* dan *huishoudelijkreglement* yang digunakan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di dalam PBST. Namun, aturan-aturan ini dibuat untuk sementara dan akan dirundingkan kembali dalam *Algemeene Vergadering* (Kongres Umum) yang akan dilakukan pada awal tahun 1928 dan melibatkan seluruh *afdeeling* PBST yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Saat pendiriannya sendiri, PBST langsung mempunyai 13 cabang dengan jumlah anggota kurang lebih 2000 orang, termasuk diantaranya di *Zuid Sumatra* yaitu di daerah Tanjung Karang dan Bengkulu.

Pembentukan PBST ini juga mendapat sambutan yang hangat dari *Hoofdinspectuur* SS dan melalui suratnya kepada PBST mempunyai pengharapan yang tidak beda seperti petinggi *Spoorbond*, jika dikutip:

“ . . . Dan saja mengharap djoega, Toean ampoenja perhimpoean itoe, dikemudian hari akan bekerdja bersama2 dengan dienstleiding SS en Tr. serta ambil djalan jang menjenangkan dan berhatsil bagi keperloeian maoepoen boeat pegawe atawa peroesahaan (*Bedrijf*) . . .”⁵⁹

Selain itu, PBST juga mendapat sambutan yang hangat dan pengharapan untuk bekerja sama dari petinggi NISM (*Nederlandsch – Indisch Spoorweg Maatschappij*) dan dari ketua perwakilan perusahaan kereta api yang ada di Hindia Belanda. Sambutan yang diterima oleh PBST umumnya mengingatkan agar kejadian seperti yang menimpa VSTP tidak terjadi dengan PBST.

Dalam bulan-bulan berikutnya *Voorlopig Hoofdbestuur* PBST sibuk untuk menyiapkan *Algemeene Vergadering* pertama yang rencananya akan dilangsungkan bulan Januari 1928. Dalam kongres pertama ini direncanakan akan melaksanakan agenda seperti memilih dan menetapkan *Hoofdbestuur* juga

⁵⁹ Salinan Soerat dari Pembesar Hisp. SS en Tr. tentang Persetoedjoean Berhoeboeng dengan Soerat Toean Voorlopig Hoofdbestuur tgl. 22 Juli 1928 No. I dalam *Kereta Api*, 15 Agustus 1927

mengesahkan *statuten* dan *huishoudelijk reglement* agar dapat meminta *rechtspersoon* kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam *orgaan* Kereta Api, *Hoofdbestuur* menyarankan kepada setiap cabang PBST untuk mengadakan *ledenvergadering* yang bertujuan untuk mengajukan nama calon kandidat *hoofdbestuur* PBST dan merumuskan usulan (*voorstel*) terhadap *statuten* dan *huishoudelijkreglement* PBST.

Untuk melancarkan pelaksanaan kongres, *Hoofdbestuur* sementara PBST yang diwakili oleh *voorzitter* dan *secretaries* mengadakan pertemuan dengan *Hoofdinspecteur* SS pada 19 Oktober 1927. Dalam pertemuan ini, *voorzitter* memohon izin dan dukungan untuk mengadakan kongres dan meminta *Hoofdinspecteur* SS untuk memberikan biaya tambahan dan izin untuk semua utusan dari cabang PBST yang akan menghadiri kongres. Permintaan ini ditanggapi positif oleh *Hoofdinspecteur* SS dengan alasan untuk keperluan pekerja dan perusahaan. Setelah mendapat dukungan dari petinggi SS, dalam *vergadering voorlopig hoofdbestuur* PBST tanggal 4 Desember 1927 diputuskan untuk mengadakan *Algemeene Vergadering* pada tanggal 22 dan 23 Januari 1928 yang bertempat di Bandung.⁶⁰

Kongres umum anggota (*Algemeene Vergadering*) PBST yang ke-I pada hari pertama tanggal 22 Januari 1928 diselenggarakan di gedung *Societeit Ons-Genoegen* Bandung. Kongres ini dihadiri oleh utusan-utusan dari *afdeeling* dan *correspondent*; *Raad van Advies* PBST; Mr. A. Hegt, *voorzitter* dari VVL; Mr. M. Nooteboom, Sekretaris HB dan anggota *Raad van Advies Spoorbond*; Wardikoen, wakil dari VIPBOW; serta utusan dari pers seperti *Algemeene Indisch Dagblad*, *Kaoem Moeda*, dan *De Locomotief*; juga hadir 6 orang anggota polisi. Kongres ini dipimpin oleh Wiriaatmadja selaku *Voorzitter* dari Pengurus Pusat sementara PBST. Dalam kongres hari pertama ini membicarakan pengesahan bunyi *statuten* dan *huishoudelijkreglement* agar dapat diajukan untuk meminta *rechtspersoon* dari pemerintah. Adapun hasil dari perundingan mengenai *statuten* dan *huishoudelijkreglement* adalah sebagai berikut:

⁶⁰ “Notulen Pembicaraan antara Hisp. SS en Tr. dengan Voorzitter dan Secretaris *Voorlopig Hoofdbestuur* PBST 19 Oktober 1927” dalam *Kereta Api*, November 1927.

- Penghilangan kata 'Klas II' dalam fasal I diterima baik oleh Kongres. Akan tetapi perubahan nama Hindia Belanda menjadi Indonesia ditolak oleh *Raad van Advies Spoorbond* dengan alasan nama Indonesia belum dianggap sah oleh pemerintah. Permintaan agar tempat kedudukan *Hoofdbestuur* tidak berada di Bandung juga ditolak dengan alasan agar berdekatan dengan *dienstleiding*. Dengan begitu fasal 1 disahkan dengan beberapa perubahan seperti di atas.
- Fasal 3f yang berbunyi "Mentjari perhoeboengan dengan perhimpoean lain, jang sama maksoednja, di Tanah Hindia Belanda atawa diloearnja" ditambahkan keterangan bahwa PBST telah berjanji tidak akan memakai *actie-politiek*. Fasal 3 - 7 kemudian diterima oleh kongres dan bunyinya tidak diubah.
- Fasal 8 dari *statuten* diubah seperti berikut ini.
 - Perkara 1: bunyinya tetap.
 - Perkara 2a: "maka *hoofdbestuur* itoe banjaknja misti gandjil (oneven) dan sedikitnja 7 orang, sedang jang paling banjak 3 orang tida diharoeskan (tida dimistikan) bekerdja pada *spoor* dan *tram*".
 - Perkara 2b: "lid-lid *hoofdbestuur* jang terbelakang ini (jang boekan pegawe *spoor* dan *tram*) di dalem *Algemeene Vergadering* cuma mempunjai soewara memberi 'pertimbangan' sadja (*adviseerende stem*)".
 - Perkara 3 dan 4: bunyinya tetap.
 - Perkara 5a: "*Dagelijksch Hoofdbestuur* itoe mengeroes pekerdjaan sehari-hari dan mempoenjai keharoesan mendjalankan atoeran (*uitverende bevoegdheid*) dan oleh *Hoofdbestuur* boleh di *detacheerd* di salah satunja *Hoofdplaats* di luar Bandoeng".
 - Perkara 5b: "di dalam hal ini, maka kepada *Dagelijksch Hoofdbestuur* itu dibantoekan soeatoe *Raad van Advies* (diloear jang 7 orang) jang terdiri dari 4 orang, atas *voorstelnya Hoofdbestuur* disjahkan cabang-cabang dengan soewara kebanjakan".

Perubahan ini diterima baik oleh kongres.

- Fasal 9 perkara 3 *Statuten* yaitu dari “paling banjak boleh sampe 11 orang” diubah menjadi ‘paling banjak boleh 13 orang’.
- Fasal 13 perkara 4 dari *Huishoudelijkreglement* (HR) diubah menjadi: Jumlahnja oeang contributie jang diterima oleh HB, misti diserahkan 20% / 30% yaitu dengan atoeran: boeat *afdeeling* jang lidnja 1- 200 orang diidjinkan mendapat potongan 20%, dan boeat *afdeeling* jang lidnja dari 2001 orang atau lebih diidjinkan mendapat potongan 30%.
- Berhubung dengan perubahan fasal 13 perkara 4 HR, maka fasal 16 perkara 1 dari HR harus juga diubah perkataan “80%” menjadi “70% atau 80% zie fatsal 13 perkara 4 HR”⁶¹

Agenda yang kedua dari kongres yaitu memilih dan menetapkan *Dagelijksch Hoofdbestuur* dari PBST. Adapun mengenai keputusan yang dicapai kongres perihal pemilihan Hoofdbestuur PBST, adalah seperti berikut.

Voorzitter : Wiriaatmadja
Secretaris : Soemono
Penningmeester : Wiriosoekarto
 Anggota : Soemodinoto, Soeparno, Gandaatmadja, Wiriosastro, Soebakin, Sastrosoewondo, dan Soengkono.

Untuk anggota *Verificatie – Commisie* diberikan kepercayaan kepada Soemono, Rijadi, dan Boedimarsono, sesuai dengan keputusan *ledenvergadering afdeeling* Bandung tanggal 1 Januari 1928. Kongres hari pertama ditunda pada pukul 14.00 dan akan dilanjutkan pada malam harinya.

Kongres lanjutan dibuka pada pukul 21.00 dan diketuai oleh Soemodinoto dengan menjalankan empat agenda. Dalam kongres lanjutan ini dilakukan pemeriksaan dan pengesahan *verantwoording voorlopig Hoofdbestuur* oleh *Verificatie – commisie*. Selanjutnya, kongres memutuskan PBST untuk menjadi anggota VVL terhitung mulai tanggal 1 Februari 1928 dan *voorzitter* PBST, Wiriaatmadja, menjadi wakil di VVL. Pembicaraan dengan utusan dari VVL yang hadir dalam kongres telah menyepakati untuk uang *contributie* bagi perhimpunan bumiputera hanya sebesar f. 0,025 setiap anggota per bulan, dan

⁶¹ “Verslag Algemeene Vergadering PBST ddo 22 Januari 1928” dalam *Kereta Api*, Februari 1928.

untuk perhimpunan bangsa Eropa jumlah uang *contributie* mencapai 4 – 8 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan oleh perhimpunan bumiputera. Agenda berikutnya yaitu menetapkan adanya beberapa *hulp-personeel* yang duduk dalam *Dagelijksch Hoofdbestuur* PBST. Ketua kongres menjelaskan bahwa *Hoofdbestuur* membutuhkan seorang *Secretaris Particuliere* yang paham bahasa Belanda dan juga dididik untuk menjadi propagandist. Selain itu, dibutuhkan juga seorang *oppaser* yang bekerja sebagai *hulp-schrijver*. Agenda terakhir membicarakan mengenai penetapan belanja (*begrooting*) untuk tahun 1928. Kongres memutuskan agar hal mengenai *begrooting* diserahkan kepada *Hoofdbestuur* dan untuk tahun 1928 uang yang tersedia ada sebesar f. 9145. Kongres lanjutan pada hari pertama ini ditutup menjelang tengah malam.⁶²

Kongres umum anggota PBST yang pertama pada hari kedua dilaksanakan tanggal 23 Januari 1928. Pada awal kongres, dibahas mengenai usaha menguatkan perhimpunan dengan membuat propaganda dan mengangkat propagandist. Namun, *voorzitter* menjelaskan bahwa keuangan PBST pada saat ini belum memadai untuk mengangkat seorang propagandist dan akan dijalankan kemudian hari jika keadaan sudah memungkinkan. Untuk mengangkat propagandis dibutuhkan orang yang paham segala hal yang berhubungan dengan *spoor* dan *tram* dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya. Kemudian, kongres juga memutuskan untuk mengadakan komisi yang menangani perihal gaji. Untuk itu, ditetapkan sebagai anggota komisi itu yang terdiri dari R. M. Harijo Soemarto, Wirjosastro, Notowasito, Soemodinoto, Gandaatmadja, *Voorzitter* dari *Spoorbond*, dan *Voorzitter* dari VVL. Terakhir, kongres membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kondisi para pekerja di masing-masing *afdeeling*. Dengan hasil-hasil putusan Kongres PBST yang pertama ini, maka dimulailah tugas dari para pengurus pusat untuk menjembatani aspirasi para pekerja *spoor* dan *tram* kepada petinggi perusahaan, demi mencapai kesejahteraan bagi para anggotanya.⁶³

⁶² “Verslag Besloten Vergadering PBST ddo 22/23 Januari 1928” dalam *Kereta Api*, Februari 1928.

⁶³ “Verslag Algemeene Vergadering PBST ddo 23 Januari 1928” dalam *Kereta Api*, Maret 1928.

BAB IV

PERJALANAN PANJANG PBST DALAM PERJUANGAN ASPIRASI PEKERJA 1928 – 1934

A. Awal Perkembangan PBST sebagai Citra Baru Serikat Pekerja Kereta Api dan Tram

PBST dalam perkembangannya dapat dikatakan sebagai organisasi pekerja kereta api yang besar. Pada permulaan tahun 1928 sudah berdiri 22 *afdeelingen* dan 20 *correspondenten* PBST yang tersebar di beberapa wilayah. Anggotanya pun tidak dapat dibilang sedikit, walaupun masih jauh dari seluruh jumlah *beambten* yang ada di Hindia Belanda. PBST juga tetap pada pendiriannya sebagai organisasi yang hanya ingin menyalurkan aspirasi para anggotanya melalui jalur diplomatis kepada pimpinan perusahaan terkait masalah kondisi kerja, perbaikan nasib anggota, dan kebijakan perusahaan. Jalan *kooperatif* yang ditempuh oleh PBST ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi zaman pada masa itu sendiri. Pemerintah Hindia Belanda yang merasa terancam dengan adanya organisasi-organisasi politik melakukan tindakan represif dengan membatasi hak-hak berkumpul dan membatasi kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Tindakan represif ini dilakukan pemerintah dengan disertai pembelaan sebagai langkah untuk menjaga keutuhan Hindia Belanda. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi-organisasi politik maupun organisasi pekerja yang ada setelah tahun 1926 cenderung memilih untuk berkompromi dengan pemerintah, hanya semata untuk dapat mempertahankan keutuhan dan eksistensi organisasinya.

Langkah cari aman ini memang berhasil digunakan untuk mempertahankan keberadaan suatu organisasi, kondisi ini berbeda dengan PNI yang tetap pada pendiriannya menjalankan azas *non-kooperatif* dan *self-help*. PNI yang berdiri pada tahun 1927, dengan diketuai dan digerakan oleh Soekarno, pada akhirnya mendapat pemeriksaan dari pemerintah Hindia Belanda dan dengan

menangkap Soekarno dan para pemimpinnya yang lain.⁶⁴ Dengan ditangkapnya Soekarno mengakibatkan PNI tidak berfungsi secara maksimal dan kegiatan-kegiatan yang diagendakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Awal tahun 1930, pemerintah Hindia menyatakan bahwa PNI tidak diizinkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan politiknya sampai diputuskannya tuntutan-tuntutan terhadap pemimpin PNI. Akhirnya pada April 1931, PNI benar-benar bubar setelah para pemimpin yang lain beranggapan bahwa PNI telah menjadi suatu organisasi yang terlarang, dan akhirnya membentuk organisasi baru yang meneruskan cita-cita PNI, seperti Partindo dan PNI-Baru.⁶⁵ Pembubaran organisasi politik seperti PNI ini merupakan konsekuensi dari cara yang ditempuh oleh mereka sendiri, yaitu *non-kooperatif* dengan pemerintah yang pada saat itu hanya akan menganggap keberadaan organisasi yang *kooperatif*. Jika suatu organisasi sudah dianggap melenceng dan dicurigai, maka pemerintah akan terus melakukan intervensi sehingga fungsi dari organisasi itu tidak berjalan.

Jika dilihat dari komposisi anggotanya, PBST merupakan organisasi pekerja yang beranggotakan pekerja-pekerja kelas rendah dari perusahaan kereta api negara, *Staatsspoorwegen* (SS). Oleh karena itu, para pekerjanya tetap dikategorikan sebagai pegawai negeri walaupun berada ditingkat yang paling bawah diantara pegawai negeri yang lain, hanya sebagai pegawai kelas 2 (*beampte*). Dengan begitu, secara langsung dapat dikatakan seluruh anggota PBST merupakan para pekerja bumiputera yang pendidikannya rendah dan hanya menempati lapisan terbawah. Setingkat diatas mereka ada pegawai kelas 1 (*ambtenaar*), pegawai tengahan yang biasanya tergabung dalam organisasi pekerja *Spoorbond*. Komposisi anggotanya terdiri dari pekerja orang Belanda dan pekerja bumiputera yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Keterikatan antara *Spoorbond* dan PBST terletak pada susunan pimpinan PBST yang merupakan anggota dari *Spoorbond*, maka kerjasama pun tidak terhindarkan antara PBST dan *Spoorbond*, walaupun kepentingan diantara mereka berbeda.⁶⁶

⁶⁴ Pembentukan PNI diputuskan dalam suatu pertemuan sebuah Kelompok Studi Umum di Bandung pada 4 Juli 1927. Lihat John Ingleson. *Jalan Ke Pengasingan*. Jakarta: LP3ES. 1988. hlm. 31 – 38

⁶⁵ M. C. Ricklefs. *Op.cit.*, hlm. 280– 283.

⁶⁶ Ingleson. *Op.cit.* hlm. 274

Status anggota PBST yang dikategorikan sebagai pegawai negeri, tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang mengatur ketentuan perusahaan-perusahaan yang berada ditangan pemerintah Hindia Belanda. Kondisi pegawai negeri pada saat itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi saja. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu mengenai pegawai negeri adalah BBL (*De Bezoldigingsregeling voor de Burgerlijke Landsdienaren*) yang berisi tentang peraturan-peraturan pembayaran upah untuk pegawai pemerintah biasa dan diberlakukan mulai tahun 1925. Kebijakan ini mengatur pembayaran upah bagi para pegawai negeri yang bekerja di perusahaan-perusahaan negara dengan ketentuan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap golongan pekerja. BBL mendapat perhatian yang cukup dari organisasi-organisasi yang menaungi para pekerja dari perusahaan-perusahaan negara, seperti *Postbond*, *Bond Personeel Waterkracht & Electriciteit*, *Spoorbond*, dan tentu saja PBST, karena kebijakan ini dianggap mempersulit keadaan ekonomi para pekerja terutama pekerja rendahan di PBST.

Dalam peraturan BBL ini, pemberian upah terhadap para pekerja pada dasarnya diukur dari keahlian yang dimiliki dan masa dinas yang telah ditempuhnya. Namun, di dalam aturan BBL ini juga, pemberian upah untuk para pekerja dibedakan dalam tiga kategori, yaitu kategori A untuk jabatan yang dikerjakan oleh para pekerja bumiputera, kategori B untuk jabatan yang di kerjakan oleh pekerja Indo-Eropa, dan kategori C untuk jabatan yang diisi oleh orang-orang Belanda. Dalam setiap kategori itu, telah diatur sedemikian rupa upah-upah yang akan dibayarkan kepada pekerja yang termasuk di dalamnya. Hal inilah yang tidak diterima oleh para pegawai bumiputera yang meminta keadilan tanpa membeda-bedakan upah berdasarkan ras dan kebangsaan.⁶⁷

Program-program yang dijalankan oleh organisasi pekerja perusahaan negara sebagian besar menyoroti masalah BBL ini, dan mengusahakan agar peraturan itu diubah sehingga dapat memberikan keadilan untuk para pekerja. PBST sebagai anggota dari VVL (*Verbond Vereenigingen van Landsdienaren*), ikut mendukung program *Gemenschappelijke Actie Tegen de BBL* yang

⁶⁷ “Van de BBL” dalam *Spoorbondsblad* tahun 1925, hlm. 354

dicetuskan oleh VVL. Program ini dicetuskan pada *Algemeene Vergadering VVL* pada tanggal 5-6 Mei 1928 di Bandung, bertujuan untuk memilih sikap anti BBL dengan membentuk *Commissie Actie BBL* yang terdiri dari utusan-utusan organisasi pekerja yang tergabung dalam VVL.⁶⁸ Di dalam *Algemeene Vergadering Spoorbond* pun, masalah BBL ini menjadi pusat sorotan. Pada kongres itu, *Hoofdbestuur Spoorbond* dan *Raad van Advies* mengirimkan *voorstel* pada SS mengenai masalah BBL, yang bunyinya: “*Het is Niet Gewenscht Dat De Spoorbond Nog Langer Aan Het Voortbestaan van De BBL Medewerkt*”⁶⁹

Di dalam PBST sendiri, perjuangan para pimpinan tetap berpusat pada perjuangan aspirasi seputar masalah kesejahteraan anggotanya, sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh anggotanya. Setiap anggota PBST berhak mengajukan surat yang berisi tuntutan mereka kepada *Hoofdbestuur* yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan SS untuk dipertimbangkan ataupun disetujui. Ada beberapa poin utama mengenai tuntutan-tuntutan mendasar yang diajukan oleh PBST kepada pimpinan SS, yang disampaikan melalui pertemuan antara *Hoofdbestuur* PBST dengan *Hoofdinspecteur* SS pada tanggal 9 Maret 1928 untuk menindaklanjuti hasil *Algemeene Vergadering* PBST yang pertama. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain adalah:

1. Perizinan mengadakan vergadering dengan menggunakan fasilitas gedung di dalam SS atau ditempat lain tanpa mengganggu jalannya dienst,
2. Permohonan untuk segera diadakannya peraturan-peraturan yang tetap tentang kenaikan pangkat (promosi jabatan) yang didasarkan oleh lamanya waktu bekerja,
3. Permohonan diberikannya *toelage* (tunjangan) kepada *Stationsbeambten* yang sudah lulus ujian *Inlandsche Haltechef* dan terhadap *Teekenaars* yang lulus *diens examen*, seperti diberlakukan kepada *Stationsklerk* klas I. Selain itu, permohonan adanya *gratificatie* kepada pegawai yang lulus ujian bahasa Belanda tanpa membeda-bedakan pangkat,
4. Permohonan diberikannya keterangan mengenai peraturan ketetapan gaji bagi *beambte* setelah keluarnya BBL,

⁶⁸ “Seputar Algemeene Vergadering VVL” dalam *Kereta Api*, Juli 1928

⁶⁹ “Gemeenschappelijke Actie Tegen de BBL” dalam *Kereta Api*, Mei 1928

5. Permohonan diadakannya perbaikan di *Zuid Sumatera* dan *Atjehtram*, dan perlu diadakannya penginapan di beberapa tempat,
6. Pengadaan perbaikan keadaan rumah-rumah (*blokwoningen*) untuk pegawai kelas 2 di *Atjehtram*.⁷⁰

Tuntutan-tuntutan diatas secara garis besar dapat dipertimbangkan dan akan disetujui oleh *Hoofdinspecteur* dengan terlebih dahulu di tunjukkan secara tersurat. Setelah pertemuan ini, *Hoofdbestuur* segera membuat surat tertulis sesuai dengan permintaan *Hoofdinspecteur* SS dengan nomor surat 838/28 tertanggal 20 April 1928, mengajukan perihal kenaikan pangkat dan pemberian *toelage* (tunjangan).⁷¹

Di dalam *Hoofdbestuur* PBST, terdapat perubahan susunan organisasi dengan diangkatnya seorang *Particulier Secretaris*. Langkah ini ditujukan untuk mengefektifkan kerja *Hoofdbestuur* dengan mengangkat seorang sekretaris yang tidak terikat dinas dengan *Staatssporwegen* (SS) sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa dibatasi ruang gerak oleh pekerjaan yang dimilikinya di dalam SS. Seorang *Particuliere Secretaris* bekerja setiap hari untuk kepentingan PBST. Mulai 1 Juni 1928 diangkatlah R. Gatot Mangkoepradja sebagai *Particuliere Secretaris* di PBST.⁷²

Tahun-tahun pertama PBST dilalui dengan biasa-biasa saja, perkembangan organisasi pada tahun 1928 dapat dikatakan cukup pesat dengan memiliki 22 *afdeelingen* dan 20 *correspondenten*. Namun, dari jumlah anggota PBST masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja (*beambten*) yang ada sekitar 40000 orang. Selain itu, keadaan para pekerja juga masih serba kekurangan baik yang bekerja di kantor, di stasiun, maupun di lapangan. Pekerjaan PBST untuk berusaha menyatukan para pekerja dalam memperkuat organisasi mendapat hambatan paling besar dari kalangan para pekerja sendiri.

Banyak pekerja yang masih meragukan eksistensi dari PBST dengan anggapan bahwa PBST belum kuat secara organisasi tidak seperti organisasi sebelumnya VSTP. Para pekerja juga ada yang kecewa dengan langkah *kooperatif*

⁷⁰ "Notulen Pembicaraan...", *Loc. Cit, Kereta Api*, April 1928

⁷¹ *Kereta Api*, Mei 1928

⁷² *Kereta Api*, Juli 1928

dengan pemerintah yang diambil oleh PBST dalam menjalankan organisasinya. Mereka beranggapan langkah itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti dalam memperjuangkan kesejahteraan para pekerja rendahan, bahkan langkah kerjasama ini hanya akan dimanfaatkan oleh para petinggi untuk semakin memeras tenaga mereka. Mereka lebih memilih untuk menunggu adanya hasil yang nyata terlebih dahulu dari PBST sebelum akhirnya mau masuk menjadi anggota.

Satu-satunya langkah PBST pada tahun 1928 yang sudah terlihat hasilnya adalah mengenai tuntutan perbaikan *blokwoningen* di Atjehtram. Melalui surat dari HB Spoorbond yang dilengkapi terusan dari *Hoofdingspecteur* SS no. S4597 tanggal 27 Desember 1928, telah dikabarkan bahwa para pekerja di Atjehtram telah mendapat perbaikan dalam hal tempat tinggal selama dinas. PBST juga mendapat berita dari cabang Plosso bahwa ada anggota PBST disana yang telah dikabulkan permohonannya menjadi *ambachtsman* (tukang) dengan upah f.75 tiap bulan mulai 1 Desember 1928.⁷³

PBST sebagai organisasi pekerja yang baru berdiri memang tidak terlepas dari masalah biaya yang dapat menentukan jalannya organisasi. Oleh karena itu, HB PBST membuat kebijakan terhadap cabang-cabang PBST di daerah dan *corespondentennya* yang bermasalah dengan pembayaran uang *contributie* (iuran bulanan). HB PBST memutuskan akan menjatuhkan sanksi *royeerd* (dikeluarkan menjadi anggota) dan sanksi skorsing bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. PBST memberikan keringanan kepada pihak-pihak yang diskorsing dengan memberikan tempo tiga bulan (sampai April 1929) untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar iuran bulanan. Namun, jika dalam waktu yang sudah diberikan tersebut tidak juga dapat melunasi iuran, maka dengan terpaksa PBST akan mengeluarkannya dari keanggotaan.⁷⁴

B. Kongres PBST (Algemeene Vergadering) Ke-2, Titik Balik Kedewasaan Organisasi

Pada tanggal 23 – 25 Mei 1929 telah diadakan *Algemeene Vergadering* PBST yang ke-2 di gedung *Sociteit Ons Genoegen*, Bandung. Dalam hari pertama

⁷³ "Jaarverslag PBST tahun 1928" dalam *Kereta Api*, Januari 1929

⁷⁴ *Kereta Api*, Februari 1929

kongres tanggal 23 Mei 1929 dihasilkan beberapa putusan mengenai masalah organisasi. Kongres menetapkan susunan *Hoofdbestuur* PBST untuk masa kerja selanjutnya yang terdiri dari:

Voorzitter : Wiriaatmadja

Secretaris : H. Sastroamidjojo (Particuliere Secretaris)⁷⁵

Penningmeester : Wiriosoekarto

Pada kongres kali ini ini, dalam HB PBST juga dibentuk *Spoedcommissie* yang diketuai oleh Soemono yang bertugas menjalankan tugas-tugas PBST yang harus diselesaikan dengan cepat. Selain itu, kongres juga menyetujui untuk mengadakan program *Steunfond* yang diadakan mulai bulan Juni 1929 dengan besarnya uang iuran adalah 1% dari yang memperoleh *bedrijfspremie*.⁷⁶

Pada hari kedua, 24 Mei 1929, kongres membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan, seperti kenaikan pangkat, cuti, tunjangan, asuransi, dan waktu kerja. Mengenai kenaikan pangkat, mulai tahun ini para pekerja mesti menjalankan *examen* (ujian kelayakan) untuk bisa mengajukan kenaikan jabatan. Masalah *vacantie verlof* (cuti), kongres sepakat mengajukan kepada pemerintah agar memberikan 14 hari cuti dalam setahun. Bagi mereka yang sudah bekerja 10 tahun agar diberikan cuti 21 hari, dan untuk yang waktu dinas sudah 20 tahun mendapat cuti 28 hari dalam setahun. Kongres pada hari kedua ini ini dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 1929 dengan membahas tuntutan-tuntutan dari afdeelingen yang kemudian dimufakati untuk diajukan kepada SS oleh HB PBST.

Sebagai kelanjutan dari hasil kongres yang ke-2, PBST mulai menjalankan program *Steunfonds* pada bulan Juni 1929 yang disetujui oleh seluruh anggota. *Steunfonds* ini dijalankan dengan memungut iuran sebesar 1% dari anggota yang mendapat *bedrijfspremie*. *Steunfonds* ini bertujuan untuk menyediakan dana cadangan yang dapat digunakan sebagai pertolongan kepada anggota yang sedang

⁷⁵ H. Sastroamidjojo diangkat menjadi Particuliere Secretaris pada 1 April 1929 untuk menggantikan R. Rachmadi Wignjodipoero yang sebelumnya mengisi jabatan itu sebagai pengganti dari Gatot Mangkupradja yang mengundurkan diri pada 15 Januari 1929. Rachmadi Wignjodipoero sendiri mengundurkan diri dengan alasan terikat dinas dengan pemerintah. *Kereta Api*, Februari 1929 dan Maret 1929

⁷⁶ "Notulen dari Algemeene Openbare Vergadering hari pertama pada Kamis 23 Mei 1929 di Societeit Ons Genoegen" dalam *Kereta Api*, Juni 1929

mendapat kesulitan dalam pekerjaannya. Dengan adanya *steunfonds* ini, PBST diharapkan dapat mengadakan lagi kebijakan-kebijakan seperti:

- a. *Weerstandskas*, yaitu persediaan uang yang akan digunakan jika ada perselisihan antara pekerja dan petinggi perusahaan. Dengan adanya *weerstandskas* ini diharapkan dapat memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban pekerja selama perselisihan belum selesai,
- b. *Strijdfonds* atau *reservefonds* yang berguna sebagai persediaan uang untuk menutup biaya yang terpakai secara tidak terduga,
- c. *Studiefonds*, yaitu persediaan biaya semacam beasiswa untuk menolong biaya anggota yang memiliki anak yang memang pintar tapi tidak mempunyai biaya. Namun, *studiefonds* ini harus dikembalikan oleh yang menggunakan dengan syarat yang ringan agar uangnya dapat masuk lagi ke kas organisasi.⁷⁷

PBST pun menjalankan program kursus bahasa Belanda dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada anggota PBST yang ingin mendalami dan mempelajari bahasa Belanda dengan biaya yang murah. Kursus bahasa Belanda sudah mulai dijalankan sejak 1 Juli 1929 yang bertempat di Gedung *Cursus SS* dengan waktu belajar tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.00 – 21.00.⁷⁸ Program ini diadakan oleh PBST menyusul adanya keputusan pemerintah tanggal 4 Januari 1929 yang menyatakan bahwa *Hoofdinspecteur SS* dikuasakan untuk memberikan *gratificatie* sebesar f.100 kepada *teekenaar* kelas 2 yang telah menyatakan bahwa mereka telah pandai berbahasa Belanda, baik secara lisan maupun tertulis.⁷⁹

Pada bulan November 1929, PBST baru mendapat *rechtspersoon* dari pemerintah yang disampaikan dengan *besluit Gouverneur Generaal* tertanggal 12 November 1929 Nomer 2x. Dengan adanya *rechtspersoon* ini, PBST diharapkan dapat bergerak lebih luas lagi dan lebih mendalam untuk memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya. Pada akhir tahun 1929, PBST mengambil

⁷⁷ Untuk kebijakan ini, PBST terus menjalankannya dan tiap bulan selalu ada laporan dari *Peningmeester* (Bendahara) yang disampaikan melalui *organ* Kereta Api. Lihat “*Steunfonds / Ondersteuningsfonds*” dalam *Kereta Api*, Oktober 1929

⁷⁸ *Kereta Api*, Juli 1929

⁷⁹ “*Gouvernementbesluit* 4 Januari 1929” dalam *Kereta Api*, September 1929

langkah yang cukup drastis dengan memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya dalam VVL. Pengambilan keputusan ini diawali dalam pembicaraan HB PBST dengan *Spoedcommissie* menyusul keputusan *Vergadering van den Raad van Gedelegeerden VVL* tanggal 16 Desember 1929. Permintaan PBST untuk keluar dari VVL akhirnya disampaikan melalui surat tanggal 23 Desember 1929 nomer 1843. Alasan yang diberikan oleh HB PBST adalah mengenai hal peraturan uang iuran dalam VVL yang walaupun diatur seadil-adilnya, HB PBST merasa tidak akan dapat bertahan lama bergabung dalam organisasi itu di waktu yang akan datang.⁸⁰

C. PBST dan Depresi Ekonomi Hindia Belanda

Memasuki tahun 1930, PBST dihadapkan pada keadaan ekonomi dalam negeri yang sedang goyah. Masa depresi memberikan dampak buruk pada kehidupan masyarakat di Hindia Belanda mulai pertengahan tahun 1930. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi mulai terasa semakin mengancam kesejahteraan para pekerja rendahan yang sebelumnya memang tidak pernah terlepas dari kemiskinan. Dengan alasan kemerosotan ekonomi itu, perusahaan-perusahaan pun terpaksa melakukan penghematan-penghematan untuk menyelamatkan kondisi keuangan agar keuntungan tetap diperoleh. Dalam masa inilah, perjuangan para pekerja kelas 2 dalam PBST mengalami masa-masa yang lebih sulit dari sebelumnya, mulai dari menghadapi kebijakan pemotongan upah sampai kebijakan pemutusan hubungan kerja.

Namun, dalam masa-masa ini justru kesadaran para pekerja rendahan akan pentingnya organisasi pergerakan serikat pekerja semakin meningkat. Serikat pekerja dirasa penting untuk menjembatani keinginan mereka mencapai kesejahteraan agar diperjuangkan dalam kondisi yang sulit. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah anggota yang tergabung dalam PBST pada tahun 1930. Saat itu, PBST tercatat sudah mempunyai 46 *afdeelingen* dengan jumlah anggota mencapai 5747 orang. PBST sendiri melakukan berbagai perubahan dalam struktur organisasi menjadi *bezoldigd hoofdbestuur* dengan mengangkat

⁸⁰ “Jaarverslag PBST tahun 1929” dalam *Kereta Api*, Januari 1930

ketua yang tidak terikat dinas dengan perusahaan dan dibayar. PBST juga membentuk suatu *Raad van Advies*, menggantikan kedudukan *Spoedcommissie* yang sudah dihapuskan. *Raad van Advies* ditugaskan meringankan beban *Hoofdbestuur* PBST yang akan bekerja lebih keras sesuai dengan tuntutan zaman.⁸¹

Selain itu, pada tahun 1930 juga PBST mencanangkan untuk mendirikan sebuah Balai Peneloeng Kematian (BPK) yang bertujuan menyediakan asuransi jiwa bagi para anggotanya. BPK bersifat tidak memaksa dan terbuka untuk setiap anggota PBST yang ingin masuk didalamnya. PBST membentuk BPK sebagai manifestasi dari pemberian jaminan sosial yang diberikan untuk kesejahteraan anggotanya, dengan syarat yang diberikan pun tidak memberatkan. Setiap anggota yang ingin mengikuti program ini, hanya diwajibkan untuk membayar premie sebesar 10 cent yang dibayarkan setiap bulan kepada HB PBST bersamaan dengan pembayaran uang *contributie*. BPK akan memberikan pembayaran sebesar f.75 kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia. Jika anggota BPK tidak meninggal dunia sampai 20 tahun sesudahnya, maka anggota tersebut akan mendapat pembayaran sebesar f.30, apabila tidak ada penunggakan dalam pembayaran *premie*.⁸²

PBST menyadari bahwa dalam kondisi zaman yang semakin berat ini, tidak mungkin untuk organisasi menjalankan perjuangannya sendiri tanpa didukung kekuatan lain. Setelah melepaskan status keanggotaannya dalam VVL pada akhir tahun 1929, PBST semenjak itu hanya berdampingan dengan *Spoorbond* dalam bekerja memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Hal ini terjadi sampai kongres PBST ke-3 memutuskan untuk bergabung dengan Persatoean *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN) yang baru didirikan di Solo pada

⁸¹ "Jaarverslag PBST tahun 1930" dalam *Kereta Api*, Maret-April 1931

⁸² "Balai Peneloeng Kematian (BPK)" dalam *Kereta Api*, Januari 1930. Dalam dua tahun pelaksanaan BPK ini telah ada 1.273 anggota yang mengikuti program ini, atau sekitar 25% dari seluruh anggota PBST. Keberhasilan program dana bantuan ini telah mendorong PBST untuk memperluas aturan-aturan dana dan mengubah biaya kematian tidak hanya untuk anggota saja tetapi keluarganya dapat diikutsertakan. Program baru yang dinamakan Balai Peneloeng Kesengsaraan ini dicetuskan pada Agustus 1932, dan menawarkan bantuan dalam peristiwa kecelakaan di tempat kerja, asuransi kematian keluarga, ataupun musibah karena dipecat dari pekerjaannya. Lihat *Kereta Api*, September 1932

12 April 1930.⁸³ Bergabungnya PBST ke dalam PVPN bertujuan memperoleh dukungan dari organisasi pekerja yang lain untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dari para pekerja.

Keputusan PBST untuk bergabung dalam PVPN atas dasar pertimbangan persamaan asas dan tujuan diantara kedua organisasi tersebut. PVPN dibentuk sebagai pusat dari pergerakan serikat-serikat pekerja yang anggotanya mempunyai status sebagai pegawai negeri. PVPN lahir atas dasar perlunya kerjasama menyatukan kekuatan untuk menolak peraturan-peraturan yang merugikan dan menyengsarakan kehidupan kaum pekerja demi tercapainya perbaikan kehidupan menuju kearah kelayakan. PVPN bertujuan untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan *bezuiniging* (penghematan) dengan mengurangi gaji para pegawai. Kepentingan para pekerja selalu terinjak-injak, dihemat dan dibuang untuk mengurangi beban yang memberatkan pihak majikan setelah semua tenaganya diperas untuk kepentingan perusahaan. *Vakcentrale* ini pun dibentuk atas dasar rasa iri akan adanya keadilan, perbedaan ras, dan perbedaan bangsa.

Serikat-serikat pekerja dalam PVPN akan bekerja bersama-sama mencari kekuatan untuk merebut hak-hak yang patut didapatkan oleh kaum buruh, dan melawan segala peraturan yang memberatkan, bahkan mencari cara untuk campur tangan dalam pembuatan peraturan agar tidak memberatkan kaum pekerja. Kewajiban PVPN sendiri adalah mendidik para anggotanya agar mereka memiliki kepercayaan pada kemampuan dirinya sendiri.⁸⁴ PVPN sejak mulai berdirinya diketuai oleh R. P. Soeroso yang juga merupakan anggota *Volksraad* Mojokerto. PVPN selalu hidup diluar pengaruh partai-partai politik dan tidak mempunyai tujuan politik sama sekali. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan itulah, PBST memutuskan untuk bergabung dengan PVPN. Selain PBST, serikat-serikat pekerja untuk pegawai negeri yang lain seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) dan Persatoean Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pun ikut menjadi anggota PVPN. Ketiga organisasi itulah yang menjadi anggota mayoritas dari PVPN dari seluruh anggota yang berjumlah hampir mencapai 29000 orang. Dengan

⁸³ "Notulen Algemeene Openbare Vergadering PBST ke-III 10 Mei 1930 di Bandung" dalam *Kereta Api*, Juni 1930

⁸⁴ "Perkataan Pendahuluan" dalam *Persatoean Sekerdja*, 15 April 1931

bergabung didalam PVPN, PBST berharap dapat memperjuangkan kepentingan anggotanya di dalam *Volksraad* melalui ketua PVPN, Soeroso.

PBST tetap terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan *vakbonden* (serikat pekerja) lain dalam menghadapi keputusan pemerintah untuk mengadakan *bezuiniging* (penghematan). Pada 6 Juli 1930, PBST bersama *vakbonden* lain di Bandung mengadakan *protestvergadering* terhadap maksud pemerintah untuk mengadakan *bezuiniging*. Selain itu, pada 13 Oktober 1930 PBST bersama *Spoorbond* melakukan *protestvergadering* sehubungan dengan adanya kemungkinan *bedrijfspremie* tidak akan dibayarkan oleh pemerintah untuk tahun 1930. Kerjasama antara PBST dan *Spoorbond* ini berjalan baik dengan membuahkan hasil, yaitu pemerintah membayar semua *bedrijfspremie* pada tahun itu.⁸⁵ PBST terus menjaga hubungan kerjasama dengan perhimpunan lain, dan dapat dikatakan hubungan itu berjalan dengan baik. HB PBST beranggapan bahwa semua kesulitan yang ada akan dengan mudah dihadapi jika dilakukan bersama-sama dengan menyatukan kekuatan. Hal inilah yang selalu diingatkan kepada seluruh *beambte* yang belum tergabung dalam PBST agar segera mendukung pergerakan pekerja kelas 2 dengan masuk menjadi anggota PBST.

Langkah *bezuiniging* yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kerugian dari belanja negara, mulai terlihat nyata pada tahun-tahun berikutnya. Di dalam *volksraad*, sudah tersiar kabar bahwa pemerintah akan menerapkan peraturan tentang pemotongan gaji (*salariskorting*) untuk pegawai negeri. Dalam *Circulaire* PVPN no.43 tanggal 7 April 1931, diberitahukan bahwa *Voorzitter* PVPN, Soeroso, yang juga merupakan anggota *Volksraad* telah menerima *regeering* tentang rencana mengurangi gaji pegawai sebagai tindak lanjut menghadapi zaman *malaise*. *Regeering* pemerintah yang disampaikan dengan surat dari Ratu Belanda tanggal 14 Maret 1931 no. 3467/33 T.B berisi tentang perintah untuk menurunkan gaji pegawai negeri yang pendapatannya f.50 dan diatasnya jumlah itu sebesar 5% yang segera dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1931. Aturan ini akan berkembang dengan penurunan gaji sebesar 10% yang akan diberlakukan mulai tanggal 1

⁸⁵ *Loc.cit.*, *Kereta Api*, Maret-April 1931

Januari 1932. Namun, ketentuan ini tidak diberlakukan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah jumlah yang sudah ditentukan.⁸⁶

Kebijakan pemerintah saat itu menjadi bahan pembicaraan umum bagi para pekerja pegawai negeri khususnya orang-orang bumiputera dan juga bagi organisasi-organisasi pekerja yang menaungi mereka. PBST dalam Kongres ke-4 yang dilaksanakan pada 7 – 9 Mei 1931 di Yogyakarta, memutuskan untuk mengajukan motie sebagai upaya mencegah diberlakukannya ketentuan tersebut. Motie ini nantinya akan diajukan oleh PBST kepada PVPN, *Spoorbond*, *Minister van Kolonien*, dan juga kepada *Staten Generaal*.⁸⁷ Di dalam PVPN sendiri, masalah *salariskorting* ini menjadi salah satu fokus utama dalam Kongres PVPN yang pertama pada 31 Mei di Solo, selain membahas tentang upaya merubah kebijakan BBL. Ketua PVPN berpendapat bahwa semua rapat-rapat untuk memprotes kebijakan pemerintah ini dalam waktu dekat ini sudah menemui jalan buntu, dan kemungkinan untuk sementara para pegawai negeri akan dengan terpaksa menerima keputusan *salariskorting* yang mulai berlaku bulan Juli. Namun, PVPN akan terus melakukan usaha kedepannya untuk membatalkan dan menghapuskan kebijakan *salariskorting* tersebut. PVPN menyebutkan bahwa keputusan untuk menjalankan kebijakan ini tidak didasari oleh azas keadilan dan dengan adanya kebijakan tersebut tentu saja sudah mengurangi hak dari para pegawai negeri. PVPN memutuskan untuk mengajukan motie kepada *Volksraad* dan berharap dapat diteruskan dihadapan *Staten Generaal*.⁸⁸

Seperti yang telah diperkirakan oleh Soeroso, ketua PVPN dalam kongresnya, peraturan pemerintah untuk menurunkan gaji para pegawai negeri sudah dijalankan pada bulan Juli 1931 sebesar 5% sudah resmi dijalankan. Oleh karena itu, PVPN bertekad untuk melakukan usaha agar keputusan ini dapat dihapuskan sebelum diberlakukan pengembangannya tahun depan dengan mengajukan sebuah amandemen di hadapan *Volksraad*. Amandemen ini diajukan pada 4 Agustus 1931 berisi sebuah motie untuk menggugurkan potongan 10% dari gaji pegawai negeri untuk tahun 1932. Walaupun sempat disanggah oleh

⁸⁶ "Dari Medja PVPN" dalam *Persatoean Sekerdja*, 15 April 1931, hlm.5

⁸⁷ "Motie Perhimpoean *Beambte Spoor* dan *Tram* di Hindia Belanda" dalam *Kereta Api*, Juni 1931

⁸⁸ "Notulen *Besloten Vergadering* PVPN pada tanggal 31 Mei 1931" dalam *Kereta Api*, Juli 1931

perwakilan pemerintah dalam bidang keuangan, Van Den Bussche agar tidak boleh diterima, amandemen dari Soeroso ini akhirnya diterima oleh *Volksraad* setelah dilakukan *stem* (voting) dengan perolehan suara 29 setuju dan 26 menolak. Selanjutnya putusan terhadap amandemen ini berada di tangan *Eerste* dan *Tweede Kamer Staten Generaal*.⁸⁹

Peraturan pemerintah dalam menjalankan *bezuiniging* tidak hanya seputar masalah gaji para pegawai. Setelah dilaksanakan pemotongan 5% gaji pegawai negeri, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Circulaire* tanggal 29 Mei 1931 kepada pimpinan-pimpinan perusahaan. Dalam *circulaire* ini, pemerintah menyatakan pendapatnya dan memberi perintah agar mengubah komposisi pekerja. Hal ini terpaksa dilakukan karena tuntutan zaman. Pemerintah menuntut supaya ada penggantian dari pegawai yang dilepas atau yang sudah pensiun dengan mengangkat pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja rendahan sehingga bayarannya lebih murah. Pemerintah juga menganjurkan agar para pekerja sementara yang sudah berumur 55 tahun atau lebih supaya dilepas dan pekerjaannya digantikan oleh para pekerja tetap. Namun kebijakan ini disertai dengan dikeluarkannya aturan tentang tunjangan pensiun bagi mereka yang dilepas, dengan memberikan 4/5 bagian uang yang sudah diatur dalam pembayaran pensiun.⁹⁰

Perjuangan PBST semakin berat di dalam menghadapi zaman malaise ini dan tentu saja para pekerja juga merasakan dampak yang lebih buruk. Perjuangan untuk menghapuskan kebijakan pemotongan gaji mengalami kebuntuan karena tidak dikabulkan oleh *Staten Generaal*. Keinginan PBST yang terwakili oleh PVPN dalam pengajuan *motie* dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah atau bahkan menghapuskan setiap kebijakan pemerintah. Kondisi lebih diperparah lagi dengan dihapuskannya peraturan *standplaatstoelage* dan diberlakukannya *crisisbelasting*, yaitu pemungutan pajak extra untuk menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, pada awal tahun 1932. Jumlah pegawai yang dilepas pun semakin banyak dengan tidak mengindahkan masa dinas. Kebijakan pelepasan

⁸⁹ "Potongan Gaji 10%" dalam *Persatoean Sekerdja*, 15 Agustus 1931, hlm.65

⁹⁰ "Atoeran onderstand boeat tijdelijk personeel jang beroemoer 55 th. atau lebih dan jang terlepas" dalam *Persatoean Sekerdja*, 15 Juli 1931. hlm.59

pegawai biasanya diberlakukan bagi mereka yang sudah tua dan sudah lama bekerja di perusahaan, namun yang tidak dapat diterima adalah adanya pelepasan jabatan terhadap pekerja yang belum lama bekerja dan umurnya pun masih muda. Banyaknya pekerja yang keluar dari posisinya dalam perusahaan, baik yang pensiun maupun dilepas, menjadi salah satu penyebab berkurangnya anggota PBST. Kekurangan ini juga terjadi dengan banyaknya anggota yang keluar karena mulai putus asa, tidak mampu bayar *contributie*, ataupun terpaksa keluar karena tidak ada pengurus di dalam *afdeeling*. Oleh karena adanya penyusutan jumlah anggota dari golongan *beambte*, PBST dalam kongresnya yang ke-5 memutuskan untuk membuka keanggotaannya bagi para *ambtenaar*.⁹¹

Semua tindakan yang merugikan bagi para pekerja itu selalu didasarkan pada depresi ekonomi yang mengganggu jalannya perusahaan. Dalam kondisi seperti ini pendapatan perusahaan dari segala jenis pengangkutan, baik barang maupun orang, mengalami penurunan. Namun PBST mempunyai pembelaan dengan memberikan pandangan lain dengan pihak perusahaan yang selalu mengatasnamakan terpaksa oleh keadaan zaman. PBST berpendapat bahwa turunnya penghasilan perusahaan bukan hanya karena malaise, tapi juga disebabkan oleh adanya persaingan dari jenis-jenis angkutan lain dari pihak swasta yang menggunakan tenaga motor, seperti *autobussen* dan *vracht auto* yang sudah tersebar di Jawa dan Sumatera. Kalahnya persaingan ini dikarenakan oleh mahalnnya tarif yang diberlakukan di jalur spoor dan tram, sehingga banyak pengangkutan yang beralih ke *autobussen* dan *vracht auto* karena tarif karcis lebih murah. Oleh karena itu, PBST menyarankan agar diadakan penyesuaian tarif agar dapat mendongrak jumlah pengangkutan. PBST juga meminta kepada pemerintah supaya pegawai rendah jangan selalu dijadikan korban dalam semua kebijakan pemerintah yang terkesan didesak oleh keadaan zaman.⁹²

Dengan adanya depresi ekonomi menyebabkan hubungan PBST dengan kantor perusahaan tidak berjalan lancar karena keadaan itu memaksa pihak perusahaan tidak bisa meluluskan segala macam permintaan PBST. Untuk

⁹¹ *Kereta Api*, Agustus 1932

⁹² "Audientie PBST dengan Gouverneur Generaal yang diwakili oleh Rafioedin dan Wiriaatdmaja (Raad van Advies) pada 14 Juni 1932" dalam *Kereta Api*, Juli 1932

menolong nasib para pekerja rendahan yang menjadi anggotanya tanpa menunggu bantuan dari perusahaan, PBST kemudian membentuk suatu komisi Balai Peneloeng Kesejahteraan. Balai ini mempunyai tujuan untuk memberikan pertolongan uang kepada anggotanya apabila ia mendapat musibah, seperti meninggal dunia, kematian istri atau anaknya, dilepas dari pekerjaannya, mengalami kecelakaan pada saat bekerja dan pada saat membela perhimpunannya. Balai ini secara resmi akan mulai berjalan pada 1 Oktober 1932.⁹³ Sampai akhir tahun 1932, SS telah melakukan berbagai kebijakan bagi perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kondisi keuangan perusahaan yang berimbas terhadap buruh. Selain melakukan pemotongan gaji, menurunkan jabatan, dan menghapuskan tunjangan, SS juga sudah melakukan pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun dan bagi mereka yang dianggap hasil kerjanya tidak baik padahal sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan.

D. PBST menjadi PPST

Memasuki tahun 1933, PBST masih saja belum dapat menjalankan programnya dengan maksimal dengan berbagai faktor yang mengganjal. Masalah keanggotaan dalam PBST menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan dari organisasi. Seperti yang sempat dituliskan sebelumnya, PBST pada awalnya hanya menerima anggota dari kalangan para pekerja pribumi kelas 2 (*beambte*). Namun, untuk lebih memajukan pergerakan dan memperkokoh persatuan para pekerja pribumi, PBST pun mempertimbangkan untuk dapat menerima semua pekerja kereta api pribumi tanpa membedakan golongan diantara mereka, termasuk para pekerja kelas 1, atau yang biasa disebut *ambtenaar*. Pembicaraan mengenai kemungkinannya PBST menerima pekerja kelas 1 sudah terdengar mulai tahun 1929. Keputusan untuk membuka pintu organisasi terhadap kaum pekerja kelas 1 dari pegawai *spoor* dan *tram* pemerintah atau swasta pun sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak kongres ke-4. Mengingat hubungan PBST dengan *Spoorbond* yang merupakan serikat pekerja kelas 1 untuk pegawai

⁹³ "Verslag pendek dari pekerjaan commissie Balai Peneloeng Kesengsaraan dan Steunfonds dari PBST" dalam *Kereta Api*, September 1932

SS, maka dibutuhkan waktu untuk berpikir dalam mengambil keputusan agar hubungan antara *Spoorbond* dan PBST pun tidak terganggu.

Keputusan akhirnya diambil juga dengan harapan menambah jumlah anggota PBST dan menampung bagi pekerja kelas 1 yang merasa kepentingannya tidak diperhatikan oleh *Spoorbond*. Keputusan untuk menerima para *ambtenaar* pun sudah dijatuhkan pada kongres PBST yang ke-5 di Bandung pada 23 – 24 April 1932. Selain itu, pada kongres tersebut juga dibentuk panitia khusus untuk mengubah anggaran dasar PBST yang terdiri dari Soekono, Rafioedin, Wiriaatmadja, Wiriosoekarto, dan H. Sastroamidjojo.⁹⁴ PBST keputusan mengubah *statuten* adalah untuk mengatur kembali tentang masalah keanggotaan agar para *ambtenaar* dapat bergabung dengan PBST dengan tujuan yang jelas sesuai dengan peraturan dari organisasi.

Setelah 6 bulan kebijakan ini diambil, kenyataan yang didapat oleh PBST jauh dari harapan jika melihat jumlah pekerja kelas 1 yang bergabung dalam PBST sangat sedikit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan urungnya niat para *ambtenaar* untuk bergabung dalam PBST, yaitu umumnya pekerja kelas 1 merasa bahwa PBST bukan tempatnya mereka bernaung. Jika nanti setelah mereka bergabung dan PBST memperoleh kemajuan, umum akan menilai PBST memajukan pekerja kelas 1 dan tidak berhasil memajukan para pekerja kelas 2. Selain itu, para pekerja kelas 1 yang akan bergabung dengan PBST juga dibedakan dalam membayar uang *contributie* dari pekerja kelas 2. Alasan yang lain beranggapan bahwa PBST sekarang mengambil haluan yang sudah tidak bersih dengan mencampurkan urusan politik di dalamnya yang bertentangan dengan *statuten* yang dimilikinya.⁹⁵

Tindakan nyata yang dilakukan oleh PBST dalam melakukan kebijakan untuk membuka pintu bagi *ambtenaar* terlihat pada tahun 1933. Sehubungan dengan tidak diadakannya kongres pada tahun 1933, PBST mengadakan *Algemeeneleden Vergadering* Loear Biasa (AVLB) dalam kepentingan untuk mengubah *statuten* yang dilaksanakan tanggal 13 – 14 Juni 1933. Dalam AVLB

⁹⁴ "Verslag Pendek dari Congres V PBST" dalam *Kereta Api*, Juni 1932

⁹⁵ "Langkah PBST terhadap kaum 1e klas" dalam *Kereta Api*, Nopember 1932

ini menghasilkan beberapa putusan, diantaranya yang utama menyangkut perubahan struktur organisasi, yaitu:

- a. Perubahan *statuten* (anggaran dasar) pada pasal 1 yaitu nama organisasi yang asalnya ‘Perhimpoean Beambte *Spoor* dan *Tram* – PBST’ diubah menjadi ‘Persatoean Pegawe *Spoor* dan *Tram* – PPST’. Jadi pasal 1 yang mengalami perubahan ini sekarang berbunyi:

“Perhimpoean ini bernama Persatoean Pegawe *Spoor* dan *Tram* (PPST), berkedoedoekan di salah satoe tempat di Indonesia jang ditetapkan oleh *Algemeeneleden Vergadering* pada tiap-tiap taoen dan diberdirikan boeat 29 taoen lamanja terhitoeng dari moelai tanggal 10 Juli 1927”⁹⁶

Keputusan ini diambil untuk menindaklanjuti hasil kongres ke-V yang diadakan di Yogyakarta, perihal penerimaan ambtenaar menjadi anggota dari PBST. Perubahan seperti ini menjadi bukti bahwa persatuan dalam pergerakan pekerja dari golongan SS sudah seharusnya tidak membedakan kelas, untuk bersama-sama memperkokoh persatuan. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, semua pihak akan lebih giat untuk menunjukkan persatuannya di dalam organisasi sendiri dengan keyakinan dan pendirian yang teguh untuk menuntut hak-hak yang sama dalam perburuhan.

- b. Perubahan pimpinan dari *bezoldigdbestuur* dikembalikan lagi ke bentuk *onbezoldigdbestuur*.

Sejak kongres ke-III tahun 1930 sudah diputuskan melakukan *rechtpositie regeling* dalam organisasi karena PBST pada waktu itu akan mengangkat *bezoldigdbestuur* yang artinya pimpinan organisasi diserahkan kepada seseorang yang merdeka atau tidak terikat dinas di dalam SS dan digaji dalam melaksanakan tugasnya. Putusan ini bertujuan agar pimpinan dapat bergerak dan menjalankan tugasnya dengan lebih bebas tanpa memikirkan pekerjaannya di SS. Pengangkatan *bezoldigdbestuur* mulai dilaksanakan pada kongres ke-IV dengan mengangkat H. Sastroamidjojo sebagai ketua, yang awalnya menjabat sebagai *particuliere secretaris*. Akan tetapi, seiring

⁹⁶ Walaupun secara resmi nama PPST baru tercetus pada saat AVLB 1933, namun secara organisasi dan badan hukum PPST ini tetap mengacu kepada pendirian PBST yang sudah terbentuk sejak 10 Juli 1928. Perubahan ini hanya meliputi perubahan nama dan status keanggotaan dengan tujuan menarik minat para *ambtenaar* untuk bergabung ke dalam organisasi.

dengan situasi zaman yang serba memaksa struktur pimpinan kini diubah kembali di dalam PPST menjadi *onbezoldigdbestuur*. Jadi pimpinan kembali dipegang kepada orang yang berada di dalam dinas SS.⁹⁷

Sesuai dengan putusan diatas, kini yang menjadi pimpinan di dalam PPST semuanya merupakan pegawai di SS, yaitu Wiriaatmadja (Ketua), A. Titaleij (Wakil Ketua), Hoesein (Sekretaris), dan Hardjosasmito (Bendahara). Perubahan nama menjadi PPST tidak berarti mengubah asas yang dianut sebelumnya. PPST tetap berjalan dengan azas kerja sama atau kooperatif dan tetap tidak revolusioner.⁹⁸ PPST pun tetap menjaga tubuh organisasi bersih dari pengaruh organisasi-organisasi politik lainnya, agar dapat terus bertahan dan tidak mendapat anggapan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.

Pada saat itu pemerintah mengeluarkan aturan lagi untuk mencegah pegawai negeri terlibat dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan negara. Aturan ini dimuat dalam *besluit* No.1 / Z Lampiran I tanggal 27 Juni 1933.⁹⁹ Di dalam *besluit* ini diatur bahwa pegawai negeri dilarang menjadi anggota ataupun membantu perkumpulan yang melakukan aksi yang dipandang membahayakan dan melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang sah menurut undang-undang kerajaan Belanda. Pegawai negeri hanya dibolehkan menjadi anggota suatu perkumpulan sekerja jika di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 1 orang pegawai negeri, juga dapat menjadi pimpinan perkumpulan sekerja jika telah membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan sebuah perkumpulan yang dilarang. Dalam *besluit* ini juga, pemerintah menyebutkan perkumpulan-perkumpulan yang dinyatakan terlarang untuk pegawai negeri yaitu, PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia), Partai Indonesia (Partindo), Persatoean Moeslimin Indonesia, dan Persatoean Sarekat Islam Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut adalah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri dengan tidak hormat.

⁹⁷ "PBST diroboh menjadi PPST, Bezoldigdbestuur diganti oleh Onbezoldigdbestuur" dalam *Kereta Api*, Juli 1933

⁹⁸ "Warta Hoofdbestuur", *Ibid.*,

⁹⁹ Diberitakan melalui Circulaire Hoofdinspecteur SS no. 67 tanggal 11 Juli 1933 dalam *Kereta Api*, Agustus 1933

Adanya perubahan PBST menjadi PPST menimbulkan berbagai opini dari berbagai kalangan, khususnya dari *Spoorbond* yang merupakan serikat pekerja para ambtenaar SS. Selama satu tahun PPST membuka pintunya bagi para *ambtenaar* pribumi dalam SS, hasilnya kurang lebih 100 orang *ambtenaar* pribumi di Bandung bergabung ke dalam PPST. Hal ini menyulut reaksi dari *Spoorbond* yang kemudian menuduh PPST mulai bertentangan dengan organisasi itu. Dan muncul pendapat bahwa *Spoorbond* terpecah menjadi dua, yaitu *Spoorbond* dan *De Inheemschen Spoorbond*.¹⁰⁰ Dari beredarnya berita tersebut, kemudian HB PPST mengadakan pertemuan dengan *Spoorbond* pada tanggal 8 Agustus 1933 untuk menyelesaikan masalah ini.¹⁰¹

Berubahnya organisasi menjadi PPST ternyata tidak banyak membantu dalam menjalankan fungsi organisasi. Perubahan ini hanya membawa dampak pada sedikit bertambahnya jumlah anggota. Dari sepek terjang organisasi, PPST tidak banyak membawa perubahan dalam memperbaiki nasib para pekerja. Bahkan situasi semakin dipersulit dengan adanya perubahan baru dari BBL tentang ketentuan gaji bagi pegawai negeri. BBL, yang sejak diterapkannya banyak memunculkan pertentangan, kini akan mengalami penyesuaian kembali dan akan diterapkan mulai tahun 1934. Untuk itu, PPST sebagai anggota dari *vakcentrale* PVPN menyetujui langkah PVPN untuk mengirimkan utusannya ke negeri Belanda dengan tujuan mengadakan pertemuan dengan *Minister van Kolonien* dalam membahas perubahan BBL dan mengupayakan agar tidak terjadi lagi pengurangan gaji pegawai. Namun, pemerintah Belanda tidak menerima adanya perundingan dan akhirnya keputusan pun secara penuh berada di tangan mereka. Perubahan BBL kemudian secara resmi dijalankan mulai 1 April 1934 dengan *Staatsblad* 1934 no.135. Menurut HBBL (*Herziening BBL*), gaji pegawai negeri mengalami penyesuaian dengan berkurang sampai 25%.¹⁰² Pergerakan sekerja bagi pegawai kereta api dan *tram* di SS dalam PPST seperti mengalami kebuntuan. Hal ini terlihat dari sedikitnya permintaan yang dikabulkan oleh SS juga dari adanya berbagai kebijakan yang tetap berjalan walaupun merugikan pihak pekerja.

¹⁰⁰ "De Stijd Begonnen" dalam *Spoorbondsblad*, 16 Juli 1933

¹⁰¹ *Kereta Api*, Agustus 1933

¹⁰² "HBBL mulai dijalankan 1 April 1934" dalam *Kereta Api*, Maret dan April 1934